



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA**

TESIS

**ANALISIS PENDEKATAN HUKUM TERHADAP KESELARASAN
ANTAR PERUNDANGAN DI BIDANG PERPAJAKAN**

Oleh :
Parwito
NPM: 6905031215
Program Studi: Ilmu Administrasi
Kekhususan: Administrasi dan Kebijakan Perpajakan

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Magister Sains (M.Si)
Dalam Ilmu Administrasi
JAKARTA

2008

TANDA PERSETUJUAN
UNIVERSITAS OF INDONESIA
FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES
DEPARTEMENT OF ADMINISTRATIVE SCIENCE
POSTGRADUATE PROGRAM

ABSTRACT

PARWITO (6905031215), LEGAL APPROACH ANALYSIS ON THE REGULATORY CONSISTENCY IN TAXZATION, x additional pages + 98 content pages + 2 pictures + 83 annexes + 42 literatures (1971-2007)

Public administration does not only provide services for the society, but also does regulate the society. This comes a consequence over the fact that service provision for certain society members will definitely limit other members' rights. Thus, service provision and regulation in public administration shall be in sound interdependency. Tax plays a very important role in this as a revenue source for the state to finance public administration's expenses. Consequently, tax as part of public administration absolutely needs legal basis as well.

This study starts from indications that a number of taxation regulations are inconsistent from the point of justice, legal certainty, and regulatory hierarchy. Shall these indications be proven, such regulations would potentially raise uncertainty for both taxpayers and tax authority. Regulatory inconsistency could plummet legal certainty in taxation that would further distort the important role and fuction of tax in national development. This condition is perilous since unlawful deeds are still able to find loopholes even in a sound regulatory environment.

This study will analyze the regulatory consistency in taxation through legal approach in public administration. The factors that presumably contribute to the inconsistency, its potential impacts, and a range of possible solutions will be explored further through this study.

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN

ABSTRAK

PARWITO (6905031215), ANALISIS PENDEKATAN HUKUM TERHADAP KESELARASAN ANTAR PERUNDANGAN DI BIDANG PERPAJAKAN, X halaman tambahan + 98 halaman isi + 2 gambar + 83 lampiran + 42 kepustakaan (1971 – 2007)

Administrasi publik tidak hanya menyediakan pelayanan bagi masyarakat, namun juga melakukan pengaturan terhadap masyarakat sebagai konsekuensi dari kenyataan bahwa penyediaan pelayanan bagi anggota masyarakat akan membatasi sebagian masyarakat yang lainnya. Sehingga, penyediaan pelayanan dan pengaturan masyarakat dalam administrasi public harus saling terkait. Pajak Negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran bagi kepentingan penyelenggaraan administrasi public tersebut dimana dalam pemungutannya dapat dipaksakan. Dengan demikian, pajak sebagai bagian dari administrasi public mutlak memiliki dasar peraturan perundangan pula.

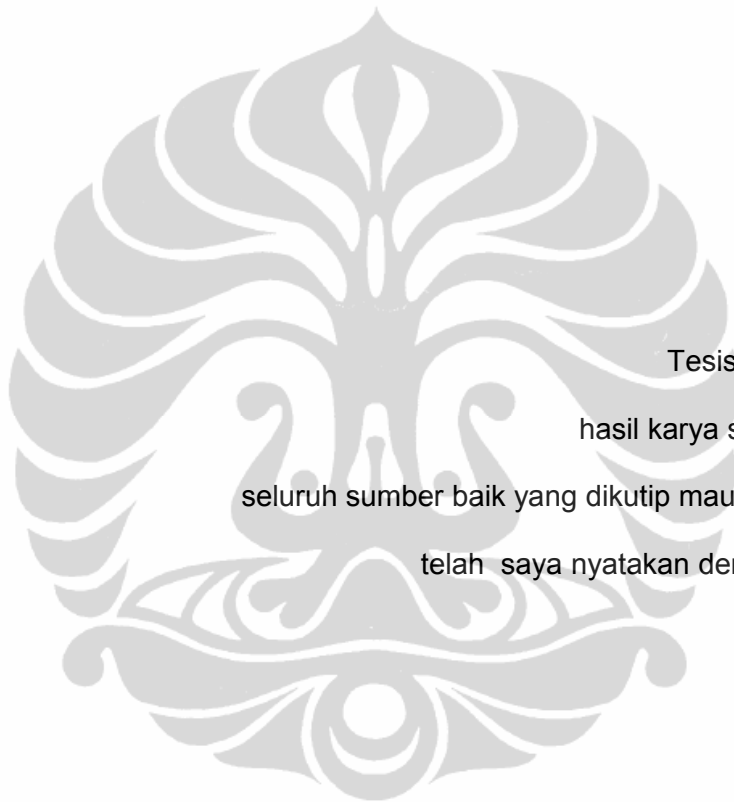
Penelitian ini mensinyalir adanya sejumlah peraturan di bidang perpajakan yang tidak selaras, baik dilihat dari aspek keadilan, kepastian hukum, maupun hierarki perundang-undangan. Jika sinyalemen ini terbukti, peraturan demikian berpotensi menimbulkan ketidakpastian pada wajib pajak dan aparat pelaksana administrasi pajak di lapangan. Ketidakselarasan antar peraturan perpajakan dapat menurunkan tingkat dalam pemungutan pajak, yang pada gilirannya akan membuka potensi bagi terdistorsinya fungsi dan peran penting pajak bagi pembangunan. Kondisi ini sangat berbahaya karena dalam keadaan peraturan yang serba pasti sekalipun, masih dimungkinkan timbulnya penyimpangan dalam tataran pelaksanaan, apalagi manakala penyimpangan itu sudah timbul pada tataran peraturannya.

Penelitian ini lebih lanjut akan menganalisis keselarasan antar peraturan perundangan di bidang perpajakan melalui pendekatan hukum dalam administrasi publik. Faktor-faktor yang memungkinkan menimbulkan adanya ketidakselarasan tersebut, kemungkinan dampak yang ditimbulkan, serta solusi yang mungkin diterapkan merupakan hal-hal yang akan dieksplorasi lebih jauh dalam penelitian ini.

Berdasarkan analisis terhadap tiga peraturan di bidang perpajakan, yang diperkaya dengan pendapat para informan penelitian, dapat disimpulkan bahwa beberapa peraturan perpajakan—paling yang menjadi objek penelitian—tidak tiga terbukti telah menyimpang terhadap peraturan perundang-undangan di atasnya dan/atau tidak memenuhi asas-asas hukum dalam pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan.

Terhadap ketiga peraturan yang terbukti tidak sesuai dengan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas hukum tersebut, pemerintah disarankan untuk mencabut atau merevisi peraturan tersebut.

PERNYATAAN ORISINALITAS



Tesis ini adalah
hasil karya sendiri, dan
seluruh sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Jakarta, Juni 2008

Penulis

Parwito

6905031215

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Nama : Parwito
NPM : 6905031215
Judul Tesis : Analisis Pendekatan Hukum Terhadap
Keselarasan Antar Perundangan di Bidang
Perpajakan

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Sidang Penguji Tesis Program Pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia pada tanggal 12 bulan Juli tahun 2008 dan telah dinyatakan: LULUS

Tim Penguji :

Ketua Sidang
Prof. Dr. Bhenyamin Hoessein (.....)

Pembimbing :
Dr. Safri Nurmantu, M.Si. (.....)

Penguji Ahli :
Dr. Saroyo Atmosudarmo (.....)

Sekretaris Sidang : (.....)
Dra. Retno Kusumastuti, M.Si.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu dari proses penyelesaian studi pada program magister, Program Pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Selama proses persiapan, penyusunan dan penulisan tesis ini, penulis banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada para pihak yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Penghargaan dan ucapan terima kasih pertama-tama ingin penulis sampaikan kepada para dosen Program Pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, yang telah memberikan segala pemikiran dan waktunya dengan memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis, khususnya Dr Safri Nurmantu selaku dosen pembimbing.

Kepada Profesor Dr. Bhenyamin Hoessein, Dr Saroyo Atmosudarmo, Dra. Retno Kusumastuti, Msi selaku dosen penguji dan memberikan masukan yang sangat berharga untuk penyempurnaan tesis ini, kami juga mengucapkan banyak terima kasih.

Secara khusus, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Djonifar AF, Bapak Nuryadi Mulyodiwarno, Bapak Ahmadi Hadibroto, dan Bapak Tb Eddy Mangkuprawira yang telah menyediakan diri sebagai informan penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Ucapan yang sama juga kami sampaikan kepada Profesor Dr. Gunadi yang selalu memberi dorongan kepada penulis untuk tetap semangat dan bersungguh-sungguh menyelesaikan tesis ini. Penulis menyampaikan terima kasih atas dukungan rekan-rekan serta para pimpinan harian Bisnis Indonesia, terutama Lulu Terianto, Ahmad Djauhar, dan Arief Budisusilo yang telah mengizinkan penulis melanjutkan studi serta memberikan kelonggaran waktu sehingga penulis dapat mengikuti perkuliahan dan menyelesaikan tesis ini. Ucapan yang sama juga penulis sampaikan kepada Haryo Bejo, Misbakun, Budi Mulyono, Guntur dan Firman yang telah banyak membantu penulis dalam proses penulisan tesis ini melalui diskusi yang sangat produktif.

Penghargaan dan rasa cinta yang besar penulis sampaikan kepada keluarga tercinta, terutama istri tercinta Arini Tri Iswari yang dengan tekun, sabar dan tulus memberi dorongan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Rasa sayang juga penulis sampaikan kepada ananda Kinanti

Sihwiluttama, Wishaka Dianpandutama, dan Panjerina Rara Kinasih yang dengan penuh pengertian merelakan penulis mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran untuk menyelesaikan tesis ini.

Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada almarhum ayahnda Suropto, ibunda Maryati dan Bapak Hadi Soewito yang telah mendidik, memberi kesempatan dan senantiasa mendoakan penulis sehingga mampu menyelesaikan studi di Universitas Indonesia ini. Ucapan yang sama juga saya sampaikan kepada Ibu Mertua Fatimah, adik-adik, dan saudara yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Akhirnya, kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu namun telah banyak memberikan bantuannya mulai dari persiapan penelitian, proses penelitian, penulisan sampai dengan selesainya tesis ini, penulis sampaikan banyak terima kasih.

Jakarta, 9 Juni 2008

Penulis

Parwito

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Signifikasi Penelitian.....	12
D. 1 Signifikasi Akademik.....	12
D. 2 Signifikasi Praktis.....	13
E. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II. KERANGKA TEORITIS	15
A. Aspek Hukum dalam Administrasi Publik.....	15
B. Pengertian Pajak dan Hukum Pajak	20
B.1. Pengertian Pajak.....	20
B.2. Pengertian Hukum Pajak.....	24
B.3. Kerangka Konseptual	29
C. Asas-Asas Hukum Pajak.....	30
C.1. Asas Keadilan.....	31
C.2. Asas Yuridis	34
C.3. Asas Hierarki.....	37
D. Asas Pemerintahan Yang Baik.....	39
E. Lembaga Penyelesaian Sengketa.....	41

BAB III.	OBJEK PENELITIAN.....	43
A.	Metode Penelitian	43
A.1.	Pendekatan Penelitian.....	43
A.2.	Jenis Penelitian.....	43
A.3.	Metode dan Strategi Penelitian.....	44
A.4.	Narasumber.....	43
A.5.	Keterbatasan Penelitian.....	45
B.	Objek Penelitian	
	46	
B.1.	Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2007 tentang Penurunan Tariff Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka.	
	46	
B.2.	Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Permintaan Keterangan atau Bukti dari Pihak-Pihak yang Terikat oleh Kewajiban Merahasiakan.	
	48	
B.3.	Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 122/PJ/2006 tentang Jangka Waktu Penyelesaian dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	
	50	
BAB IV	ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	52
A.	PP No.81/2007	53
A.1.	Pendapat Mengenai Asas Keadilan.....	54

A.2. Pendapat Mengenai Asas Yuridis	57
A.3. Pendapat Mengenai Asas Hierarki	64
B. Permenkeu No. 201/PMK.03/2007	65
B.1. Pendapat Mengenai Asas Keadilan.....	67
B.2. Pendapat Mengenai Asas Yuridis	69
B.3. Pendapat Mengenai Asas Hierarki.....	72
C. Perdirjen Pajak No. 122/PJ/2006	73
C.1. Pendapat Mengenai Asas Keadilan.....	76
C.2. Pendapat Mengenai Asas Yuridis	79
C.3. Pendapat Mengenai Asas Hierarki.....	82
D. Perkembangan Selama Penelitian	83
D.1. Ketentuan Mengenai <i>Sunset Policy</i>	84
D.2. Ketentuan Mengenai Kuasa Wajib Pajak	89
E. Analisis Faktor Penyebab.....	93
E.1. Faktor Beban Target Penerimaan	93
E.2. Faktor Pemusatan Kekuasaan.....	94
E.3. Faktor Interaksi Antar Kelompok Kepentingan.....	96
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kedudukan Hukum Pajak.....	26
Gambar 2. Kerangka Konseptual.....	29



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Lapisan	Tarif	Pajak	Penghasilan
.....				
.....				
	47			

